



LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

Stasiun KIPM Mamuju





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj TW I Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggung jawaban dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait Sasaran strategi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj TW I Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun 2025 adalah Rencana Kegiatan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju (Renstra Stasiun KIPM Mamuju) Tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 beserta Realisasinya.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju di masa mendatang.

Mamuju, 08 April 2025
Kepala SKIPM Mamuju,




Darwis, S.Pi., M.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada Tahun 2025 adalah sebesar 106.72%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Mamuju yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju telah ditetapkan target indikator kinerja sebanyak 15 IKU dan ada beberapa IKU yang sudah Terealisasi di TW I dan ada juga beberapa IKU yang belum Terealisasi karena baru Terealisasi pada Triwulan berikutnya, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70 terealisasi 100 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70 terealisasi 100 %
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi) 1 lokasi tidak masuk dalam target triwulan I
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Mamuju dengan target (%) 99 dan terealisasi sebesar 100 % dan melebihi target sebesar 101 %
5. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 75 tidak masuk dalam target triwulan I
6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 75 tidak masuk dalam target triwulan I
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 92 tidak masuk dalam target triwulan I



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 71.5 tidak masuk dalam target triwulan I
9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 100 tidak masuk dalam target triwulan I
10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) 87 tidak masuk dalam target triwulan I
11. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 86 tidak masuk dalam target triwulan I
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 85 % dan terealisasi sebesar 100 % dan melebihi target sebesar 117 %
13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 76 dan terealisasi sebesar 100 % dan melebihi target sebesar 120 %
14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 70 tidak masuk dalam target triwulan I
15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 88 dan terealisasi sebesar 89.48 % dan melebihi target sebesar 101 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.4 SDM Stasiun KIPM Mamuju.....	7
1.5 Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Kegiatan 2021–2025.....	11
2.2 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran	14
2.3 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	15
2.4 Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisa dan Evaluasi.....	21
BAB IV PENUTUP	72
Lampiran - Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.Sasaran Kegiatan SKIPM Mamuju.....	13
Tabel 2.Target Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 3.Alokasi Pagu TA 2025.....	18
Tabel 4.Sasaran Kegiatan1 (SK1).	20
Tabel 5.Sasaran Kegiatan 2 (SK2).	24
Tabel 6.Sasaran Kegiatan 3 (SK3).	26
Tabel 7.Sasaran Kegiatan 4 (SK4).	27





DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar1.Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju	7





LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Asas penyelenggaraan good governance adalah Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Mamuju dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Mamuju. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja





Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Mamuju merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Mamuju menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan lembaga inspeksi;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional laboratorium dan lembaga inspeksi ;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Sambil menunggu PERMEN yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT, untuk Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 ini masih Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Mamuju dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan unsur pelaksana Pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan di daerah dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Umum;
- b. Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- c. Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen;
- d. Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Manajemen Mutu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksana Koordinasi Tim Kerja pengendalian dan pengawasan mutu primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Selain itu, juga melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan

pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan keamanan hasil lingkup Unit Pelaksana Teknis;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Produksi Primer di UPT.

Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Mutu Pascapanen di UPT.

Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis. Selain itu juga menyelenggarakan Fungsi ;

- pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup UPT di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pengelolaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut :



1.3 Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Mamuju

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dibantu oleh 1 (satu) Kepala Urusan Umum 2 (dua) tim kerja yaitu **Pelaksana Koordinasi Tim Kerja pengendalian dan pengawasan mutu primer, Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen dan Pelaksana Koordinasi Tim Kerja Manajemen Mutu** serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Verifikator Keuangan, Penata Keuangan APBN, APK APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju saat ini berjumlah 11 orang pegawai dengan dibantu 1 orang PPPK dan 4 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 5 orang pegawai PJLP.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 ini menyampaikan tingkat pencapaian kinerja Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2025. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi kinerja TW I Tahun 2025.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek Kegiatan serta permasalahan utama (*strategicissued*) yang sedang dihadapi
- BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan.

BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kegiatan 2025–2029

Perencanaan Kegiatan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disusun dengan cara mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya lain agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari system kinerja instansi pemerintah.

Stasiun KIPM Mamuju telah menyusun perencanaan Kegiatannya dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025 -2029 serta sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Selaras dengan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka UPT Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki fungsi menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya untuk kelangsungan usaha perikanan serta sebagai instrument teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan.

Kontribusi Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati ikan, kelautan dan perikanan, dan meningkatkan

produktivitas serta dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan pola konsumsi global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh UPT BPPMHKP.

Berdasarkan perubahan global dan agar mampu menjawab tantangan dan mengemban fungsi tersebut, maka Stasiun KIPM Mamuju yang diposisikan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan sebagai subsistem dari sistem pencegahan/perindungan (proteksi) kesehatan ikan dan sumber dayaperairan dari ancaman penyakit ikan, maka harus memiliki visi yang mampu menggerakkan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang lestari serta sebagai penggerak dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan.

Dalam peningkatan mutu produk dan produktivitas usaha perikanan serta daya saing maka perlu sentuhan teknologi dibidang usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan sehingga terjadi efisiensi. Hal tersebut merupakan basis industrialisasi dibidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan global dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi BKIPM sebagai berikut :

Visi : “Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing”. Penjelasan **Hasil perikanan**, mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya dimaksud ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau

sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; **Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman**, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (aman konsumsi); **Terpercaya** mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (*HC* dan *HACCP*) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan international.

Misi : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.

Adapun Tujuan Kegiatan Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung Pengawasan, Pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah menjamin mutu hasil perikanan nasional”

2.1 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran

Sasaran Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan mendukung Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Mamuju

SK	SASARAN KEGIATAN
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Pengawasan Mutu hasil kelautan perikanan
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten sesuai standar
SK3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kebijakan yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta manajemen pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Peningkatan dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan penerapan SNI dalam operasional laboratorium uji dan lembaga inspeksi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional.
4. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu-hilir.
5. Pengembangan akuntabilitas kinerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan kebijakan diatas yang merupakan landasan dalam penyusunan rencana kerja atau program. Program Stasiun KIPM Mamuju tidak terlepas dari program BKIPM yaitu program Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dijabarkan dalam kegiatan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPMHKP lainnya.

Kegiatan yang telah disusun tersebut merupakan aktualisasi operasional dari suatu rencana Kegiatan yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi dan berlaku untuk periode satu tahun. Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2025 mengelompokkan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan diantaranya :



1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ikan dengan kegiatan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Manajemen Mutu
2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2.2 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Salah satu dari 9 (sembilan) program nasional Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Kinerja. Penerapan penguatan kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah berupa peningkatan kualitas Laporan Kinerja dan kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja pada Kementerian yang mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada bulan Januari 2025 Kepala Stasiun KIPM Mamuju sebagai pihak pertama dan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (Lampiran 2). Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Adapun Target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel 2 berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi)	1
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju	99
SK 2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
SK 3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Mamuju	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71.5
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	87
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	86

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)Mamuju (%)	88
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	77,5

2.2 Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Mamuju pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.484.031.000. Adapun alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Mamuju TA.2025

No.	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	130.069.000	130.069.000
2	Manajemen Mutu	145.000.000	145.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	3.208.962.000	3.208.962.000

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard system aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju sebesar 106,72% (kategori Baik). Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh dari pencapaian indicator kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program Badan pengendalian dan Pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada triwulan I Tahun 2025 untuk setiap Sasaran Kegiatan dalam dashboard system aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indicator kinerja untuk setiap Sasaran Kegiatan. Pengukuran pencapaian indicator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indicator yang telah disepakati sebelumnya.

Ringkasan capaian indicator kinerja Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 disajikan pada Tabel Berikut:



Tahun	Level-1	Level-2	Level-3	
2025	Belum di pilih...	Belum di pilih...	Belum di pilih...	
Download Tampilkan				
TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
105600000 - STASIUN KIPM MAMUJU				
106.72%	+	+	+	

3.2 Analisis dan Evaluasi

SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja dari Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 4. SK1. Target dan realisasi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I TAHUN 2025	Realisasi TW I 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)		
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99	100

IK.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai

dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

1. Capaian

Indikator Kinerja jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan SKIPM Mamuju di ukur dengan menghitung jumlah Realisasi sertifikat CPIB yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2025, capaian 5 Sertifikat sudah Terealisasi sebanyak 5 Sertifikat sehingga total 16 sertifikat, sehingga prosentase capaian 100%. Realisasi penerbitan sertifikat CPIB seperti disajikan dalam tabel 5 di bawah ini

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
Realisasi	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
70	70	70	100	70	70	100

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan yaitu:

- a. Inspeksi ke Supplier untuk penerbitan Sertifikat CPIB baru
- b. Verifikasi ke Supplier untuk verifikasi Sertifikat yang sudah diterbitkan

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada Unit Pengolah Ikan dan supplier, karena dengan tersertifikasinya supplier akan menjamin mutu dan ketertelusuran bahan baku yang masuk ke UPI.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antarlain terbatasnya jumlah supplier di Wilayah Kerja Stasiun KIPM mamuju, kurang minatnya suplier untuk disertifikasi CPIB karena salah satu persyaratan sertifikasi harus memiliki NPWP yang dipandang merepotkan bagi suplier.

IK.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan

perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

$$\%X = (A+B)/xn \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn =Jumlah dari unsur pembentuk (2)

2. Capaian

Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Stasiun KIPM Mamuju dari target 2 pada Tahun 2025 dan Terealisasi sebanyak 2 sertifikat HACCP yaitu UPI CV. Sakura Prima.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir(end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Pada Tahun 2025, telah Dilakukan Monev sebanyak 2 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP dari 2 target yang telah ditetapkan sebanyak ruang lingkup produk. seperti disajikan pada Tabel 2.11, 3 dari target 2 ruang lingkup atau mencapai 100 %

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Target/Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
70	70	70	100	70	70	100

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACC Plingkup SKIPM Mamuju yaitu :

- a. Survailen HACCP.
- b. Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Target yang ditetapkan Tahun 2025 untuk IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju I ditargetkan 2 rekomendasi/ruang lingkup. Stasiun KIPM Mamuju berhasil merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju, yaitu 2 rekomendasi/ruang lingkup. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP

IK. 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

1. Capaian

Kontribusi SKIPM Mamuju dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan dipasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Pada Tahun 2025, sertifikat Kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang memenuhi syarat sejumlah 13 dari total 13 Sertifikat dan Sertifikat Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 13 tanpa ada penolakan HC. Rincian HC kesehatan ikan dan HC mutu dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

Sehingga capaian pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 99%. Terhadap notifikasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten negara mitra tersebut, BPPMHKP akan melakukan *temporary suspend* kepada UPI bersangkutan, menginvestigasi penyebab permasalahan serta UPI melakukan perbaikan sistem jaminan mutu terhadap proses produksi. Pencabutan suspend sudah dilakukan setelah UPI melakukan Tindakan perbaikan dan BPPMHKP menyampaikan notifikasi Kembali ke negara mitra.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor (%)						
Realisasi Tahun 2024	Target/Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
98	99	100	101.01	98	99	101.01

2. Analisis Keberhasilan / Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (*end product testing*). Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptic dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain: Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor yang dihitung melalui pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor pada Tahun 2025 Terealisasi 100% dari target 99%.

SK.3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 6. SK1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	Realisasi TW I 2025
SK 2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	92	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71.5	
	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	100	
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	87	
	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	86	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85	85
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76	76
	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	88	89.48

IK.6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Mamuju

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM),

masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

1. Capaian

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) yang menggunakan elektronik SKM (*e-survey* SKM) melalui website <http://ok.bppmhkp.kkp.go.id/skm/> yang dilakukan setiap triwulan dan pada Tahun 2025 mendapat perolehan nilai 3.92 dengan target nilai 3.36.

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Mamuju dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejahternya kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Mamuju.

Pada Tahun 2025, Realisasi indikator ini 3.92 dari target 3.36 atau mencapai 116.67%, Realisasi Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju seperti disajikan dalam tabel 2 di bawah ini.

Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2023	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2025	% Capaian thd Target Renstra
	3.36	3.92	116.67		3.36	116.67

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM

Mamuju (nilai)

2. Efektitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)
3. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (parameter)
4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%).

IK. 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Mamuju Terealisasi 100% dari target 85%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun KIPM Mamuju untuk TW I Tahun 2025 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 januar 2025 s.d Maret 2025 atau Tahun 2023 s.d Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP . Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

Keterangan:

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Mamuju

$\sum N$: Jumlah rekomen dasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SKIPM Mamuju

Tabel 2.20. Target dan Realisasi IK22 pada Tahun 2022

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2024	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Target	%Capaian thd

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

	2025			2024	2025	Target Restra
80	85	100	117	80	100	120

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Monitoring Temuan atas laporan keuangan yang telah di jadikan temuan BPK atau itjen

IK. 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju pada Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku memiliki target sebesar 76 dan Terealisasi sebesar 100 Persen Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP sejak tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktifitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadisangat Kegiatan dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan prosedur dan aturan yang berlaku.

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2025

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
Realisasi	Target 2025	Realisasi	%Capaian	Target 2024	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
84.34	85	100	120	80	84.34	105.43

Pada tahun 2025 indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang atau jasa BPPMHKP memiliki target 85 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Triwulan I Tahun 2025, dapat diperoleh.

BABI V
PENUTUP

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Mamuju TW I Tahun 2025 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan Kegiatan dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025.

Tingkat capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan dan laporan yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan secara internal.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, Stasiun KIPM Mamuju tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa masukan dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program



JALAN MARTADINATA SIMPANG EMPAT ARTERI SIMBORO, MAMUJU 91512
TELEPON (0426) 22434, FAKSIMILE (0426) 22434.
LAMAN www.kkp.go.id SUREL skipm.mamuju@gmail.com

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN





DATA EKSPOR 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Mamuju
Report Operasional Harian Karantina Ikan
Periode Tanggal 01/01/2025 00:00:00 AM Sampai 31/03/2025 23:59:59 PM

Kegiatan : Ekspor

No	Tanggal Berangkat / Datang	Media Pembawa		Kode Izin	Jumlah Media Pembawa			Tujuan	Alat Angkut	Fak. Tindakan Karantina Ikan								Tempat Tindakan	Sistem Lain	Tindakan Tindakan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Kelas	Nama Umum		Volume	Satuan	HSCODE			P1	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P2	P3	P4			P5	P6	P7	P8	No. Ser	No. Ser																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	E/E/45.0/20250111/000001 / 11/01/2025	A.1	CYSAKRAPRIMA	Nilai Shipmen : 255,759,000.00 Rupiah / Nilai Komoditas : 255,750,000.00 Rupiah							1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0